

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah termasuk menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh daerah, baik itu di perkotaan besar maupun perkotaan kecil. Kebersihan suatu daerah dari sampah serta pelayanan mengenai pengelolaan sampah oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pembenahan utama yang harus dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan meningkatnya aktivitas masyarakat serta pemerintah dalam suatu pembangunan, adalah salah satu penyebab permasalahan dalam lingkungan khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya produksi sampah. Sampah merupakan permasalahan yang cukup rumit dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Banyak masyarakat di Indonesia tidak memiliki kepedulian pada sampah, padahal nyatanya dengan membuang sampah bukanlah lagi solusi yang baik untuk permasalahan sampah. Sampah perlu diolah dan perlu melewati berbagai macam tahapan untuk diurai, oleh karena itu sudah saatnya masyarakat mulai mengambil peran untuk mengolah sampah. Salah satu penghasil sampah terbanyak adalah sampah rumah tangga, ini menunjukkan bahwa masing-masing keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meminimalisir jumlah sampah yang mereka hasilkan memperhatikan faktor kebersihan dan lingkungan yang

berkelanjutan berkaitan erat dengan kualitas Kesehatan keluarga. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mencatat 37,3% sampah di Indonesia adalah berasal dari sampah rumah tangga. Berdasarkan capaian kinerja pengelolaan sampah di tahun 2022 yang terdiri dari 23 Kabupaten/kota se-Indonesia, sampah yang terkelola sebesar 53,75% dan penanganan sampah sebesar 37,62% sedangkan pengurangan sampah hanya sebesar 16,13%. Tidak semua daerah di Indonesia mempunyai kesadaran dalam mengelola sampah secara besar, hanya beberapa daerah saja sehingga upaya penanganan dan pengurangan sampah masih terhitung minim.

Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ayat (1) Bab (1) dijelaskan bahwa tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak, bin, tong, kantong, atau keranjang sampah. Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Untuk membantu mengurangi dan mengolah sampah yang ada, Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Banyuroto, Kapanewon Nanggulan.

Pengelolaan sampah di TPA Banyuroto adalah satu-satunya TPA yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan sampah yang digunakan masih secara konvensional, dimana hal ini belum bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan menimbulkan permasalahan Kesehatan.

Keadaan permasalahan sampah semakin kompleks diakarenakan adanya bandara di Kulon Progo yang menambah potensi timbunan sampah.

Untuk menghitung produksi/timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo dapat menggunakan SNI 19-3983-1995 tentang standar berat sampah yang dihasilkan oleh rumah permanen yaitu antara 0,350-0,400 kg/org/hari. Jika jumlah Penduduk Kulon Progo pada tahun 2020 sebanyak 426.420,00 jiwa, maka total produksi sampah di Kabupaten Kulon Progo adalah $426.420,00 \times 0,4 \text{ kg} = 170.568 \text{ kg/hari}$. Dalam satu tahun maka produksi sampah yang dihasilkan $170.568 \times 365 = 62.257.320 \text{ kg}$ atau 62.257,3 ton. Sedangkan sampah yang dapat ditampung di TPA Banyuroto sebanyak 24-35 ton/hari. Artinya masih banyak sampah yang belum terangkut ke TPA Banyuroto (Dewanti dkk., 2020). Hal ini diakibatkan masih banyaknya masyarakat yang mengelola sampahnya secara tradisional yaitu dengan membakar sampah, menimbun sampah, bahkan masih ada yang melakukan pembuangan sampah ke area sungai dan selokan.

Tabel 1. 1 Volume Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah (m ³ /hari)	Timbulan sampah (Ton/hari)
1	Temon	29125	34.98498498	11.65
2	Wates	48948	58.7963964	19.5792
3	Panjatan	38784	46.58738739	15.5136
4	Galur	32749	39.33813814	13.0996
5	Lendah	41108	49.37897898	16.4432
6	Sentolo	50042	60.11051051	20.0168

7	Pengasih	52529	63.0978979	21.0116
8	Kokap	36115	43.38138138	14.446
9	Girimulyo	24621	29.57477477	9.8484
10	Nanggulan	30883	37.0966967	12.3532
11	Samigaluh	28093	33.74534535	11.2372
12	Kalibawang	29877	35.88828829	11.9508

Sumber : Website resmi satu data Kulon Progo

Tabel 1. 2Potensi Timbunan Berdasarkan Sumber Asalnya

Sumber Asli	Besarnya Timbunan
Pemukiman	89 ton (0,2/kg/org/hari)
Jalan	6,009 ton (0,0009 kg/meter/hari)
Rumah Makan	0,322 ton (9,76 kg/unit/hari)
Hotel	2,69 ton (2,69 kg/hotel)
Lokasi Wisata	0,28 ton (5 kg/lokasi/hari)
Pasar	8,775 ton (292,5 kg/pasar)
Kantor	0,609 ton (0,08 kg/pegawai/hari)
Toko	10,41 ton (0,5 kg/pegawai/hari)

(Sumber : Website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo)

Kalurahan Bugel merupakan salah satu desa yang ada di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Terletak di area pesisir menjadikan Desa Bugel mempunyai potensi besar di sektor pariwisata yaitu wisata pantai. Potensi sektor pariwisata ini cukup membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Melalui objek wisata Pantai Bugel, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjual beraneka makanan di area pesisir. Berangkat dari hal tersebut, muncul berbagai permasalahan mengenai kebersihan pantai yang kurang terawat. Meskipun sudah dilakukan upaya dalam meningkatkan kebersihan daerah wisata dengan memberikan tempat sampah, hal tersebut kurang menjadi perhatian masyarakat. Belum lagi masalah sampah yang terbawa dari arus laut membuat area bibir pantai terlihat cukup kumuh. Selain area pariwisata, timbul permasalahan kebersihan lingkungan dari area pemukiman warga.

Penumpukan sampah yang ada di Kalurahan Bugel disebabkan tumpukan sampah yang tidak terangkut ke TPA Banyuroto, sehingga warga Kalurahan Bugel lebih memilih untuk mengelola sampah secara tradisional seperti menimbun sampah, membakar sampah, dan membuang sampah ke area pengairan. Hal inilah menyebabkan Kalurahan Bugel menjadi kawasan rawan penyakit, terlebih di musim hujan dengan banyaknya sampah yang ada di Kalurahan Bugel menjadikan lingkungan sekitar rumah warga tidak terjaga dengan baik.



Gambar 1. 1 Kondisi salah satu selokan di Dusun IV Kalurahan Bugel 2022

Awal mula dari penumpukan sampah dan permasalahan kebersihan lingkungan inilah yang memotivasi pemuda-pemudi Karang Taruna Kusuma Tanaya. Awal mulanya berdiri bank sampah ini atas inisiatif dan kesadaran pemuda-pemudi Karang Taruna dalam menghadapi permasalahan sampah yang ada di Pedukuhan IV. Konsep dari bank sampah ini adalah hasil penjualan sampah yang sudah terkumpul tidak dibagikan ke warga, akan tetapi masuk ke dalam kas karang taruna, remaja masjid, dana pengelola dan dana sosial. Hal tersebut

dilakukan karena masyarakat Pedukuhan IV percaya bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, program dari bank sampah tersebut juga ada bersih pantai yang dilakukan satu bulan sekali untuk membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di Pantai Bugel dan sebagai acuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar akan pentingnya kebersihan pantai.

Pada tahun 2020, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan, Kulon Progo, sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Pilot Project Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera (LSKS). Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera (LSKS) ini merupakan kegiatan pembangunan karakter untuk masyarakat yang dimulai dari remaja hingga lansia dan menjadi panutan dalam keluarga untuk mensyukuri hidup sehat dan bersih sebagai akhlak dan budaya nasional dalam mewujudkan keberlanjutan bangsa, menghargai nilai luhur alam dan melestarikan lingkungan, sehingga terwujud untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan faktor penting yang bisa mempengaruhi kesehatan anak dan ibu serta faktor tersebut adalah faktor yang sensitif. Keterkaitan sampah dengan lingkungan sehat keluarga sejahtera tersebut menjadi faktor penting untuk kesehatan khususnya kualitas SDM yaitu stunting. Penyebab stunting ada tiga, pertama yaitu lingkungan yang tidak sehat, kedua nutritional dan terakhir kurang mendapatkan makanan yang cukup. Maka dari itu mempunyai lingkungan yang sehat juga dapat mencegah stunting, karena lingkungan yang bersih berpengaruh hingga 70% terhadap pencegahan stunting. Dengan adanya

pilot project ini dapat membantu Kalurahan Bugel dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan desa dan memberikan edukasi kepada warga mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Pengelolaan sampah harus bisa berjalan dan dikolaborasikan oleh semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, kelompok organisasi, masyarakat maupun swasta. Pengelolaan sampah harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat maupun pemerintah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan membuat inovasi, lalu memikirkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah agar permasalahan tersebut bisa ditangani dengan mudah dan lebih efektif serta efisien.

Dalam UU No. 18 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sampah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, bahkan menjadi ancaman bagi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah ini merupakan tanggung jawab semua pihak, dimana semua kalangan masyarakat mempunyai peran dalam masalah ini. Tentunya semua kalangan masyarakat tidak bekerja sendiri, diperlukannya kolaborasi antar pihak untuk menghasilkan suatu kebijakan yang bisa diterima semua kalangan masyarakat agar permasalahan sampah tersebut bisa teratasi dan semua dapat berjalan secara beriringan tanpa ada tumpang tindih kekuasaan.

Seluruh lapisan masyarakat bertanggungjawab dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Untuk meningkatkan potensi pengurangan sampah lebih baik dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah, yaitu kesadaran diri dari masyarakat dalam mengelola sampah. Hal tersebut juga disebutkan dalam Bab 12 Pasal 45 Perda Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengenai peran serta masyarakat, dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud adalah menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah serta hak untuk memberikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggal.

Pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih dan meminimalisasi *stunting* sehingga memperkuat ketahanan keluarga di Kalurahan Bugel. Pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Bugel melibatkan beberapa stakeholder diantaranya BKKBN melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kalurahan Bugel, Bank Sampah dan Masyarakat melalui tahap negosiasi hingga mencapai kesepakatan dalam membuat pelaksanaan sebuah program pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah ini dibuat sebagai bentuk ketahanan keluarga yang

merupakan tujuan dari Kalurahan Bugel. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Bugel.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Bugel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas. Diharapkan dengan adanya penelitian mengenai analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Bugel ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses kolaborasi antar stakeholder sehingga bisa menghasilkan suatu kebijakan dalam upaya mengurangi permasalahan sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan serta menambah referensi ilmu untuk konsep *collaborative governance* terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada penelitian-penelitian berikutnya sesuai dengan disiplin ilmu yang digunakan penelitian.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bisa memberikan rekomendasi untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan bisa menjadi masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan terkait dengan pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Manfaat praktis untuk beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi ini diantaranya:

1) Bagi Kalurahan Bugel

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Kalurahan Bugel mendapatkan pengetahuan baru mengenai alur proses kolaborasi dan dapat memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program pengelolaan sampah.

2) Bagi Dinas PMD Dalduk dan KB

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak Dinas PMD Dalduk dan KB mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses kolaborasi serta pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

3) Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo mempunyai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

4) Bagi Bank Sampah

Diharapkan bank sampah yang ada di Kalurahan Bugel bisa mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses kolaborasi dan bisa meningkatkan keaktifan komunitas melalui proses kolaborasi tersebut.

5) Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Bugel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 3Tinjauan Pustaka

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ranti Meidita Lestari, Tazkiya Farahnisa	<i>Collaborative Governance</i> Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwaktu.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan cerobong sampah dan bank sampah di Desa Kramatwaktu terjadi dikarenakan inisiatif salah satu warga yang membawa permasalahan sampah dan memberikan solusi penanganan permasalahan sampah di musrenbangdes dan disepakati oleh Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya, proses <i>collaborative governance</i> yang berjalan sudah baik, akan tetapi ada satu kendala yaitu komitmen masing-masing RW dalam mengelola cerobong sampah tersebut dan kurangnya partisipasi masyarakat yang Sebagian besar mempunyai rasa gengsi dalam mengumpulkan sampah.
2.	Mukhaeri Ikram	Pendekatan	Hasil penelitian tersebut adalah

		<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala.</p>	<p>proses kolaborasi dengan pendekatan <i>collaborative governance</i> yang sudah berjalan antara Pemerintah Kecamatan Manggala, Bank Sampah Sektoral Manggala, Pegadaian dan Masyarakat mengalami penurunan dalam faktor komunikasi dikarenakan kondisi pandemi. Pemenuhan administrasi dan pencacatan nasabah dilakukan oleh Pegadaian yang ada di Kecamatan Manggala. Keberhasilan proses kolaborasi juga didukung oleh faktor kepercayaan semua pihak yang terlibat. Komitmen yang dilakukan juga mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi.</p>
3.	Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, Agus Zaina; Abidin	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo'ok berasal dari pemukiman masyarakat dan sarana pelayanan masyarakat. Proses <i>collaborative governance</i> yang terjadi berdasarkan teori Ansel dan Gash dalam Islamy yaitu ada empat variable <i>collaborative governace</i> yaitu kondisi awal <i>collaborative governance</i> yang ditunjukkan dengan lokasi awal Bank Sampah Sejahtera di lahan kosong. Lalu untuk desain kelembagaan aturan dasar yang mengatur proses kolaborasi yang ada di Bank Sampah Sejahtera adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonsia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Komunikasi yang berjalan dalam</p>

			proses kolaborasi berjalan dengan baik melalui koordinasi melalui pengelola Bank Sampah Sejahtera, yang menjadi kendala adalah minimnya anggaran dana operasional.
4.	Devita Rizqi Hidayanti, David Efendi	Praktik <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah.	Hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait praktik <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan yaitu dari delapan indikator penerapan teori <i>collaborative governance</i> , hanya ada tiga indikator yang belum terpenuhi yaitu komitmen terhadap tujuan, information sharing serta sumber daya manusia. Lalu jika dilihat secara keseluruhan, praktik <i>collaborative governance</i> di TPA Piyungan tersebut belum berjalan secara efektif berdasarkan teori ekologi politik dan pembangunan secara berkelanjutan Sebagian besar tidak terpenuhi.
5.	Djogeh Harmana, Ella I. Wargadinata, Ismail Nurdin	Pengelolaan Sampah Sampah Berbasis <i>Collaborative governance</i> di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Menurut hasil penelitian dari penulis adalah pengelolaan sampah yang berbasis <i>collaborative governance</i> di Kota Tarakan belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan pihak swasta. Lalu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dikarenakan minimnya informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Hal tersebut juga didukung dengan adanya faktor internal seperti kurangnya fasilitas untuk

			pengelolaan sampah.
6.	Horas M. Panjaitan, H.M. Aries Djaenuri, Reydonnyzar Moenek, Marja Sinurat	Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta	Hasil penelitian ini adalah proses tata Kelola kolaboratif dalam pengolahan sampah di Provinsi DKI Jakarta masih bersifat konvensional yang terlihat dari control kepemimpinan yang masih sangat besar, hambatan pengembangan pengetahuan dalam organisasi. Hal ini menyebabkan tata Kelola kolaborasi menjadi terlihat terlalu birokratis, kaku dan berjalan lamban. Proses tata Kelola kolaborasi yang terjadi masih harus menunggu arahan pimpinan dan masih kurang memiliki kemampuan dalam membangun networking dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.
7.	K Q Ain, M A Nasri, M N Alamsyah, M D R Pratama and T Kurniawan	<i>Collaborative governance</i> in managing plastic waste in Bali	Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah plastik di Bali berdasarkan dasar hukumnya telah berjalan dengan baik namun partisipasi masyarakat dan kepatuhan masih kurang karena tujuan bersama antara pemangku kepentingan yang belum terbentuk. Tingginya jumlah sampah plastik di laut Bali juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran dan saling pengertian masyarakat.
8.	Adelia Dwinta Amelinda, Arimurti Kriswibowo	<i>Collaborative governance</i> in Waste Management (Study In The Integrated Waste Management Site	Hasil dari penelitian tersebut adalah <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah di wilayah TPST Tambakrejo dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo,

		of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency)	Pemerintah Desa Tambakrejo, serta PT. KSM Guna Lestari. Hal ini dikarenakan proses <i>collaborative governance</i> telah terjalin dan berjalan sebagaimana dibuktikan dengan model <i>collaborative governance Ansell and Gash</i> . Terutama pada kondisi awal terbentuknya kolaborasi memunculkan insentif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga menyebabkan stakeholder memiliki komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi tersebut.
9.	Diana Hertati, Lukman Arif	<i>Collaborative governance in the Managements of a Waste Bank</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> merupakan bagian dari system yang terstruktur melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah dilakukan secara proporsional dalam pengelolaan bank sampah ini. Penelitian ini menggunakan <i>collaborative governance</i> dengan model <i>Ansell and Gash</i> dan menghasilkan penyelesaian masalah yang baik. Bank sampah merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam membangun sirkulasi ekonomi melalui pengelolaan sampah yang menghasilkan ekonomi kerakyatan.
10.	Ivan Dhimas, Sri Hastjarjo, Yulius Slamet	<i>Collaborative governance of Integrated Waste Management</i>	Hasil dari penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kolaborasi yang terjadi antar stakeholder terjadi pada saat pembentukan TPS terjadi berbagai pergolakan dalam proses kolaborasi yang terjadi. Meski begitu, hal-hal tersebut ditemukan dalam proses pemerintahan desa yang terlibat dalam pembuatan sebuah

			kebijakan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa proses kolaborasi ini menggunakan konsep Penta Helix collaboration antara pemangku kepentingan. Melalui proses kolaborasi tersebut, ada proses komunikasi yang akhirnya mencapai kesepakatan Bersama. Para pemangku kepentingan dan pemerintahan sudah melakukan berbagai pengembangan non-instan sejak tahun 2018-2022 untuk mewujudkan program ini.
11.	Suryani	Domestic Waste Management Based on Collaborative governance in Pekanbaru City	Hasil dari penelitian menemukan bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pengelolaan sampah, terutama dalam kesiap siagaan dan partisipasi. Lemahnya informasi publik mengenai <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, ditemukan bahwa kolaborasi yang berjalan hanya dari pemerintah dan pihak swasta sebagai pihak ketiga yang mengelola sampah di Kota Pekanbaru.
12.	Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, Lucitania Rizky	Model Collaborative governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di	Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, diemukan hasil bahwa ancaman terhadap ketahanan lingkungan maritime yang ada di Kepulauan Seribu adalah pencemaran sampah plastic yang secara tidak langsung mengancam beberapa aspek, seperti keberlangsungan keanekaragaman hayati,

		Kepulauan Seribu.	<p>ekosistem laut, ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Dalam menangani permasalahan ini, Indonesia sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder baik itu melibatkan yang ada di dalam negeri seperti pihak swasta, LSM/NGO, pemerintah daerah, masyarakat, maupun di lingkup internasional. Untuk level local kebijakan pemerintah pusat telah diturunkan ke dalam pemerintah daerah pada level di tingkat provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Akan tetapi penulis mengungkapkan bahwa penanganan permasalahan sampah tersebut diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan negara-negara lain dan penulis tidak membahas lebih jauh mengenai analisis kolaborasi antar negara.</p>
13.	Thomas Bustomi, Andre Ariesmansyah, Asep Kusdiman	Partisipasi Publik dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung dan Jepang dalam Menanggulangi Sampah di Kota Bandung.	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum partisipasi warga dalam pengelolaan sampah masih kurang. Factor yang mempengaruhi adalah kondisi awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama diantara pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Selain itu factor lain seperti kurangnya pengetahuan warga mengenai pengelolaan juga mempengaruhi partisipasi dalam pengelolaan sampah.</p>

Sumber: Olahan Penulis

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis bisa disimpulkan bahwa hampir semua penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu pelaksanaan kolaborasi yang berjalan dengan proses identifikasi awal permasalahan hingga proses kolaborasi menggunakan konsep *Ansell and Gash*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar, ada yang terkendala faktor partisipasi masyarakat, hubungan sektor pemerintah dengan sektor swasta yang kurang baik serta tidak ada pelibatan dari sektor swasta dalam proses kolaborasi. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, untuk proses identifikasi kolaborasi sama seperti penelitian sebelumnya menggunakan konsep *Ansell and Gash*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian-penelitian terdahulu mayoritas membahas proses kolaborasi antara stakeholder Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintahan Desa dan Bank Sampah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini membahas proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang melibatkan stakeholder Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Kalurahan Bugel, Bank Sampah dan satu lagi stakeholder yaitu BKKBN melalui Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo yang belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Collaborative governance

A. Definisi Governance

Sebelum membahas konsep *collaborative governance*, perlu dijelaskan konsep mengenai *governance*. *Governance* merupakan

dasar dari konsep *collaborative governance* sehingga perlu dijelaskan pemahaman mengenai konsep *governance* agar mendapat pemaknaan yang lebih konkrit dan tidak terjadi kerancuan bagi penulis maupun pembaca. Dalam aspek studi Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hamper mempunyai makna yang sama namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain.

Perbedaan tersebut disesuaikan dengan konteks dalam pemakaian istilah *governance*, “*Governance*” berasal dari kata “*govern*” yang berarti mengambil peran lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan serta lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dalam artian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanti, 2015:251). Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan.

B. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan jenis “*governance*” yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi. Dalam *collaborative governance* ini menyertakan pemangku kepentingan

guna mendorong pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi masalah yang kompleks secara efektif, sehingga *collaborative governance* mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan alternatif bagi manajemen top-down, pembuatan kebijakan dan implementasi. Pengawasan dimana satu atau lebih entitas pemerintah terkait langsung dengan entitas non-pemerintah. *Collaborative governanace* bisa didefinisikan sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif yang menekankan focus yang lebih formal. Pemangku kepentingan yang mempertimbangkan dan merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau ditujukan untuk administrasi publik, program atau asset.

Collaborative governance menurut *Ansell dan Gash* merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dlaam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan. Menurut pendapat *Ansell dan Gash*, *collaborative governance* merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga publik dengan pihak lain yang terkait guna menyelesaikan masalah publik.

Gray (1989) dalam bukunya “*Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*” mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan:

“sebuah proses yang melalui pihak-pihak yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan-perbedaan mereka dan mencari solusi yang melampaui visi mereka yang terbatas mengenai apa yang mungkin terjadi”.
(*Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi - La Ode Syaiful Islamy H. - Google Buku, t.t.*)

Definisi ini berfokus pada bagaimana pemangku kepentingan dengan kepentingan, kekuatan dan kelemahan yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Kerja sama bukan tanpa kemungkinan konflik. Konflik cenderung muncul ketika implementasi melibatkan pembagian kekuasaan atas sumber daya penyampaian layanan. Namun, komitmen untuk mencapai tujuan yang sama sangat penting dalam tata kelola kolaboratif. Agar pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman menjadi faktor penentu dalam membentuk kerja sama, faktor internal seperti kepemimpinan politik dan dukungan finansial juga menentukan.

Faktor kunci dalam terbentuknya kolaborasi ini adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan pengalaman. Sains mempertemukan pemangku kepentingan dengan memicu perhatian publik terhadap suatu isu dan menetralkan perbedaan nilai di antara para partisipan.

Kekuatan eksternal juga penting, termasuk kepemimpinan politik dan dukungan keuangan dari luar, karena faktor-faktor ini berkontribusi terhadap pembentukan kolaboratif serta kemungkinan kelanggengan dan keberhasilannya. (*Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi - La Ode Syaiful Islamy H. - Google Buku, t.t.*)

Dari pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan, serta Lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka bisa saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif dan implementasi yang berorientasi consensus.

Collaborative governance telah menjadi masalah dalam konsep dan aplikasi yang muncul dalam administrasi publik karena telah diadopsi hingga pada tingkat local. Konsep *collaborative governance* biasanya mengacu pada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan serta melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks atau situasi *multi-faceted problems*.

1. Pendekatan *Collaborative Governance*

a. *Collaborative governance* dalam Pendekatan Deskriptif dan Eksplanatory

Tujuan pendekatan deskriptif dan eksplanatori dalam teori administrasi publik adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fakta sosial (Bailey, 1968). Sebagai teori deskriptif dan penjelas, teori manajemen koperasi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam koperasi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan koperasi, yaitu: bagaimana orang melihat masalah sosial, bagaimana orang berinteraksi atau mengatur diri mereka sendiri, keputusan apa yang kemudian diambil dan bagaimana keputusan itu dilaksanakan dan apa efek yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.

b. *Collaborative Governance* dalam Pendekatan Normative

Biasanya, teori administrasi publik berurusan dengan nilai-nilai publik seperti kepentingan publik, ekuitas dan tanggung jawab, serta kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai nilai publik dan bagaimana perlakuannya. Dengan kata lain, teori normatif administrasi publik mencoba menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai publik apa yang diinginkan atau dibahas. Pendekatan normatif dalam tata kelola kolaboratif menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif memiliki cara memfasilitasi demokrasi deliberatif, memberdayakan warga untuk mendapatkan informasi untuk membuat keputusan politik, menyelesaikan

masalah sosial kronis, membangun rasa saling percaya antar pemangku kepentingan, peluang untuk pembelajaran sosial dan formulasi solusi kreatif.

c. *Collaborative governance* dalam Pendekatan Instrumental

Pendekatan instrumental dalam administrasi publik berfokus pada pertanyaan "bagaimana", seperti metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik. Pendekatan instrumental adalah kunci untuk administrasi publik karena ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan dalam pendekatan instrumental sejauh mereka membantu para ahli untuk melakukan sesuatu.

2. Tujuan *Collaborative governance*

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan saat ini. Munculnya kolaborasi tiap Lembaga atau institusi ini mempunyai alasan yang melatar belakangi. *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba, hal ini dikarenakan harus ada inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk melakukan kerja sama serta koordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi publik.

Kolaborasi muncul diakibatkan banyaknya keberagaman kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan suatu kolaborasi. Dengan dilakukannya kolaborasi ini bisa memobilisasi

kelompok-kelompok kepentingan dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi juga menjadi solusi dari buruknya implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja dikarenakan keterbatasan lembaga tersebut. Kolaborasi juga bisa dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program dan kegiatan.

3. Model *Collaborative Governance*

Menurut Quade (1989), model merupakan abstraksi dunia nyata, substitusi, atau representase realita dalam bentuk peta, diagram organisasi, persamaan matematika dan lain-lain. Model digunakan untuk membantu saat berhadapan dengan fenomena nyata yang kompleks dan mahal jika dikaji secara langsung. Model merupakan cara alamiah untuk memperoleh gambaran dunia nyata dengan mempelajari replica yang mencerminkan fenomena (*Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi - La Ode Syaiful Islamy H. - Google Buku, t.t.*)

Dalam konsep *collaborative governance*, model *Ansell and Gash* yang paling sering digunakan. Model ini mempunyai empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing dari variabel tersebut bisa diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan

direpresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi.

Kondisi awal dalam organisasi menentukan dasar tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial dapat menjadi peluang dan tantangan kerja sama. Perencanaan kelembagaan berperan sebagai aturan dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan kepemimpinan sebagai mediator dan enabler kerja sama. Setiap variabel dijelaskan lebih rinci:

a. Kondisi Awal

Berbagai literatur menunjukkan bahwa banyak proses kolaboratif yang gagal karena ketidaksepakatan antara pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan, ketidaksepakatan ini didasarkan pada pengalaman pahit para pemangku kepentingan, di mana muncul masalah emosional lokal yang saling mempengaruhi, sehingga muncul permusuhan timbal balik. Berdasarkan permasalahan tersebut, Ansell dan Gash (2008) merangkum permasalahan tersebut dalam tiga variabel, yaitu:

- Adanya ketidak seimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi.
- Harus ada insentif yang jelas dalam berkolaborasi.
- Adanya ketakutan akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilaksanakan.

b. Desain Kelembagaan

Perencanaan kelembagaan mempertimbangkan keikutsertaan forum kerja sama kelembagaan, aturan dasar untuk mendukung kerja sama, dan proses penyelenggaraan kerja sama yang transparan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

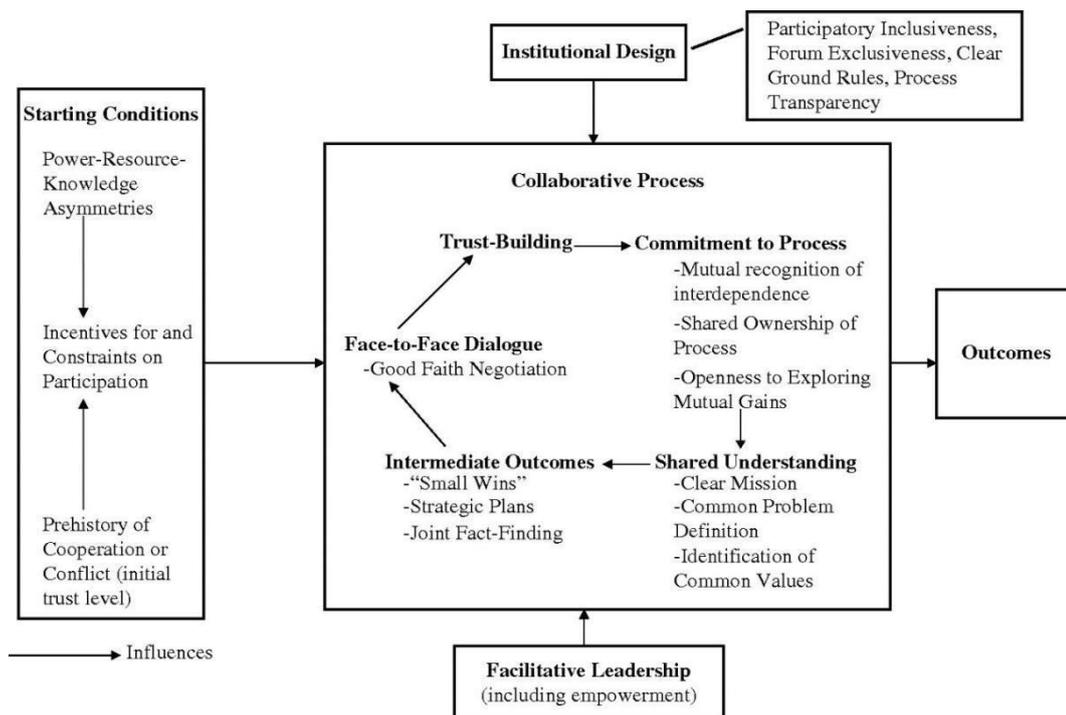
Kepemimpinan secara luas dipandang sebagai unsur penting dalam membawa partai-partai ke meja perundingan dan untuk mengarahkan mereka dari proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang akan dilakukan memperhatikan hal-hal tersebut:

- Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.
- Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

- Berbagai pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi, serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi.
- Intermediate outcomes, dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategik, dan penemuan fakta-fakta secara bersama.
- Face to face dialogue dalam hal ini adalah melakukan negosiasi dengan itikad yang baik.



Gambar 1. 2 Model Collaborative governance Ansell and Gash

Sumber : Buku Collaborative Governance Dan Aplikasi La Ode Syaiful Islamy H.

1.6.2 Pengelolaan Sampah

A. Definisi Sampah

Definisi sampah dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan hasil sisa-sisa dari kegiatan penghasil sampah yang merupakan setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Dari timbulan sampah tersebut jika dibiarkan menumpuk akan menjadi sumber sampah.

Ruang lingkup sampah yang dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ada tiga, terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Asal dari sampah rumah tangga adalah dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

B. Pengelolaan Sampah

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan Kembali, dan pendauran ulang atau biasa disebut dengan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sedangkan

kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan Alex (2012) berpendapat bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah setidaknya dengan tiga cara yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan Kembali sampah dan/atau pendauran ulang sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha. Lalu dilanjutkan dengan fasilitasi kepada masyarakat, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran daur ulang dan penggunaan ulang sampah lalu yang terakhir membatasi timbulan sampah yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa pemilahan yang dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima yaitu:

- 1) Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3.
- 2) Sampah yang mudah terurai.
- 3) Sampah yang dapat digunakan Kembali.
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang.
- 5) Sampah lainnya

Dalam pemilahan sampah tersebut dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah untuk tiap jenis sampah di setiap rumah tangga, wilayah pemukiman, Kawasan pemukiman, Kawasan komersil, Kawasan industri, Kawasan rekreasi dan pariwisata, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya.

Untuk upaya pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga pengelola sampah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah di area desa atau kelurahan, kecamatan, Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Lembaga pengelola sampah tingkat desa mempunyai tugas untuk mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai pedukuhan dan mempunyai hak untuk mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada camat. Selain itu dalam Pasal 24 Perda Kabupaten Kulon Progo No, 1

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas untuk menyediakan tempat sampah di masing-masing Kawasan, mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah. Aspek yang terpenting dalam pengelolaan sampah adalah tanggung jawab dan kesadaran diri dari setiap orang.

C. Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu inovasi yang bisa dilakukan dalam mengurangi permasalahan sampah yang menumpuk. Bank sampah umumnya dilakukan dengan system nasabah, yaitu orang yang menyetorkan sampahnya ke bank sampah akan menjadi nasabah yang mana sampah yang dikumpulkan ditimbang dan uang dari penjualan sampah tersebut masuk ke dalam rekening tabungan bank sampah milik nasabah. Perkembangan pengelolaan bank sampah yang ada sekarang ini memperlihatkan bahwa selama ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif berdasarkan, identifikasi, permulaan, musyawarah, dan implementasi.

1.7 Definisi Konseptual

A. *Collaborative governance*

Collaborative governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif merupakan salah satu bentuk dari konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance. Konsep ini menyatakan

bahwa aktor publik dan aktor swasta sangatlah penting dalam bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan dan kebijakan yang baik untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik dan aktor swasta bukanlah suatu hal yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi merupakan kerja sama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara individu atau independent. Proses *collaborative governance* menurut *Ansell and Gash* yaitu 1) *face to face dialog*, 2) *commitment to process*, 3) *trust building*, 4) *share understanding*, 5) *intermediate outcomes*.

B. Pengelolaan Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Salah satu yang fasilitas yang bisa membantu mengatasi permasalahan sampah adalah bank sampah. Bank sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilah. Hasil pengumpulan sampah yang telah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan sampah atau pengepul sampah. Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia, yaitu mengajak masyarakat untuk sadar bahwa semua pihak berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sampah.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1. 4 Definisi Operasional

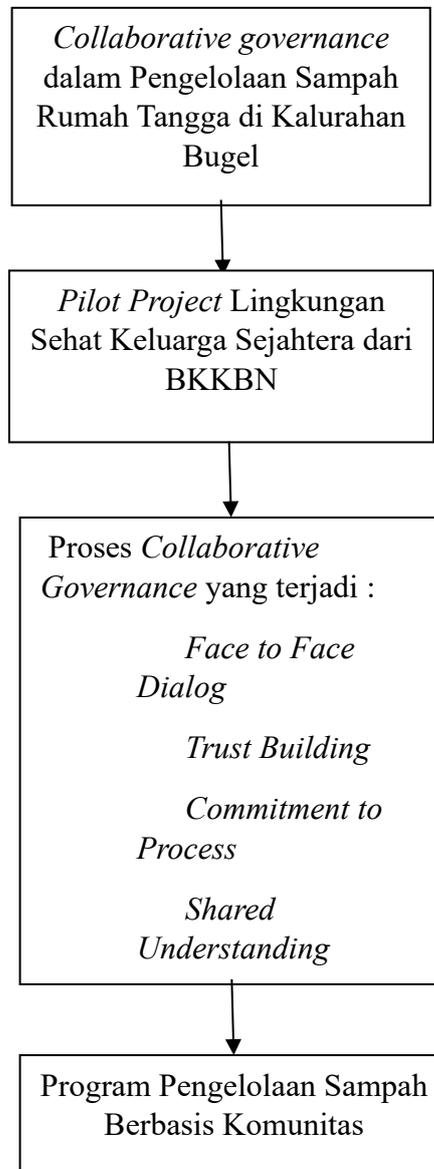
No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Face to face dialogue</i> (Dialog tatap muka)	a. Frekuensi dalam dialog yang dilakukan oleh Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo, DLH Kulon Progo, Kalurahan Bugel, Bank Sampah dan Masyarakat	- Media dialog (online/offline) - Frekuensi pertemuan/tahun
2.	<i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan)	a. Profesionalitas (terlaksananya program kerja atau kebijakan dari para stakeholder)	- Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program yang sudah dirancang. - Kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan materi pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.
		b. Ketepatan sasaran dan biaya dalam pelaksanaan program	- Jumlah sasaran warga yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel - Transparansi biaya dan pelaksanaan program

			pengelolaan sampah.
3.	<i>Comitment to Process</i> (Komitmen terhadap proses)	Sumber daya dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan - Fasilitas - Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.
4.	<i>Share Understanding</i> (Sikap saling memahami)	a. Visi, Misi, dan tujuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Bugel.	Ketepatan program pengelolaan sampah dengan visi dan misi dari Kalurahan Bugel.
		b. Peran masing-masing stakeholder dalam <i>pilot project</i> LSXS	<p>Tugas pokok dan fungsi dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo ● DLH Kulon Progo ● Kalurahan Bugel ● Bank Sampah yang ada di Kalurahan Bugel ● Masyarakat <p>dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.</p>
5.	<i>Intermediate Outcome</i> (Hasil Sementara)	a. Program pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan sampah yang sudah terlaksana. - Jumlah masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.

		<p>b. Keberlanjutan program pengelolaan sampah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Tindak Lanjut (RTL) pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel. - Alokasi dana yang dirancang untuk keberlanjutan pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.
--	--	---	--

Sumber: Olahan Penulis

1.9 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah dilakukan dari inisiatif awal dari beberapa masyarakat yang ada di Kalurahan Bugel di pedukuhannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Bank

Sampah Kusuma Tanaya Bugel IV yang diinisiasi dari Karang Taruna. Lalu seiring dengan berjalannya waktu tersebut, dengan adanya penunjukan percontohan menjadi Kampung KB, BKKBN juga menunjuk Kalurahan Bugel sebagai percontohan pelaksanaan *Pilot Project* Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera (LSKS) yang merupakan salah satu bentuk penguatan ketahanan keluarga yang dimulai dari kebersihan lingkungan.

Menurut konsep kolaborasi, kolaborasi merupakan suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non-pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Kalurahan Bugel yang mengacu pada *Pilot Project* Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera (LSKS), pihak-pihak yang terlibat adalah Kalurahan Bugel, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, BKKBN melalui Dinas PMD Dalduk dan KB, beberapa Bank Sampah yang ada di Kalurahan Bugel dan masyarakat.

Dalam proses *collaborative governance*, mengacu pada konsep *Ansell and Gash* ada lima tahap, seperti 1) *face-to-face dialogue* (dialog tatap muka), 2) *trust building* (membangun kepercayaan), 3) *commitment to process* (komitmen terhadap proses), 4) *shared understanding* (sikap saling memahami), 5) *intermediate outcomes* (hasil sementara) sebelum akhirnya melahirkan sebuah kebijakan atau program.

1.10 Metode Penelitian

Sub bab metode penelitian ini merupakan bagian dari cara yang akan ditempuh oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya. Hal tersebut dilakukan agar gambaran mengenai teknik atau cara dalam melaksanakan penelitian bisa dijelaskan secara menyeluruh. Dalam sub bab metode penelitian ini akan meliputi bagian-bagian seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk tema “Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kalurahan Bugel, Panjatan, Kulon Progo” ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif ini berdasarkan tema penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Bisa dikatakan bahwa penulis akan menggambarkan suatu gejala atau fenomena atau dengan kata lain sifat tertentu, dan hal tersebut tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variable. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana arah *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau daerah dimana penelitian tersebut akan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini akan dilakukan di :

- 1) Kalurahan Bugel, Kapanewon Panjatan
- 2) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kulon Progo
- 4) Salah satu Bank Sampah yang ada di Kalurahan Bugel yaitu Bank Sampah Kusuma Tanaya.

Adapun alasan dalam memilih objek lokasi tersebut adalah dikarenakan menjadi lokasi penelitian dan beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dalam pengelolaan sampah dan hal tersebut sesuai mengenai tema *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini oleh penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utama. Sumber utama yang akan penulis peroleh adalah *indepth interview* (interview mendalam) dan observasi lapangan dari berbagai sumber yang telah ditentukan sebelumnya dan berdasarkan observasi di lapangan untuk menghasilkan data real-time. *Indepth*

interview merupakan *interview* mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah hasil dari *indepth interview* mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah yang ada di Kalurahan Bugel dengan beberapa narasumber terkait. Hasil dari data primer melalui teknik wawancara tersebut berupa teks naratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung adalah data yang didukung oleh data primer yang disediakan oleh penulis. Sumber data sekunder ini berasal dari hasil yang dokumentasi dan informasi tambahan dari sumber yang mendukung hasil penelitian. Penulis menggunakan data sekunder seperti website resmi Kalurahan Bugel, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, BKKBN, dan Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo. Penulis juga menggunakan data sekunder seperti anggaran belanja Kalurahan Bugel tahun 2022, daftar hadir peserta di setiap kegiatan pengelolaan sampah, serta daftar bank sampah yang ada di Kalurahan Bugel.

Tabel 1. 5 Data Sekunder

No.	Sumber	Data Sekunder
1.	Kalurahan Bugel	Struktur organisasi Kalurahan Bugel
		Daftar Bank Sampah di Kalurahan Bugel
2.	Dinas PMD Dalduk dan KB	Visi dan misi Dinas PMD Dalduk dan KB
		Struktur organisasi Dinas PMD Dalduk dan KB
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup
		Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup
4.	Bank Sampah Kusuma Tanaya	Sejarah singkat Bank Sampah Kusuma Tanaya
		Daftar warga yang berpartisipasi
		Konsep Bank Sampah Kusuma Tanaya
		Catatan Keuangan Bank Sampah Kusuma Tanaya

Sumber: Olahan Penulis

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang cukup krusial dan penting dalam menentukan kelancaran penelitian dan lebih

terkendali. Menentukan teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa meminimalisir hambatan dan kesalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data atau informasi dan fakta pendukung yang ada di lapangan sebagai keperluan penelitian. Untuk penelitian analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel, Panjatan, Kulon Progo, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data diantaranya:

1) Wawancara

Teknik wawancara merupakan sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Metode tersebut adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/narasumber. Dalam wawancara ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Data yang akan dihasilkan dalam teknik wawancara ini adalah data yang bersifat real-time dan digunakan sebagai data primer atau data pokok oleh penulis.

Tabel 1. 6 Daftar Narasumber

No.	Daftar Narasumber	Jumlah (orang)	Keterangan	Data yang akan diambil
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo	1 (satu)	Pendamping <i>Pilot project</i> LSKS	- Media dialog yang dilakukan dalam pelaksanaan kolaborasi - Frekuensi

				<p>pertemuan dialog dalam satu tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan kerja sama yang dibuat antar stakeholder yang terlibat - Susunan program yang dibentuk. - Timeline pelaksanaan program. - Sumber keuangan, fasilitas, jumlah sumber daya manusia yang terlibat. - Tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.
2.	Sub Koordinator Kelompok Substansi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	1 (satu)	Fasilitator <i>pilot project</i> LSKS	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kalurahan Bugel. - Tugas pokok dan fungsi DLH dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. - Sumber keuangan,

				<p>fasilitas, jumlah sumber daya manusia yang terlibat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar pemateri yang terlibat dalam program pengelolaan sampah.
3.	Lurah Bugel	1 (satu)		-
4.	Kesra Kalurahan Bugel	1 (satu)	Koordinator pelaksanaan program kepada Bank Sampah di Kalurahan Bugel	<ul style="list-style-type: none"> - Visi dan misi Kalurahan Bugel berkaitan dengan kesesuaian program pengelolaan sampah. - Tugas pokok dan fungsi dari Kalurahan Bugel dalam pengelolaan sampah. - Sumber keuangan, fasilitas, jumlah sumber daya manusia yang terlibat. - Kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang pernah dilaksanakan. - Daftar peserta setiap

				<p>kegiatan pengelolaan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah. - Rencana Tindak Lanjut (RTL) pengelolaan sampah. - Alokasi dana yang dirancang untuk keberlanjutan pengelolaan sampah.
5.	Ketua Bank Sampah Kusuma Tanaya	1 (satu)	Implementer pelaksanaan program pengelolaan sampah dan koordinator kepada warga dalam mengarahkan kegiatan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Visi dan misi Bank Sampah Kusuma Tanaya. - Keaktifan kegiatan pengelolaan sampah. - Sumber keuangan, fasilitas, jumlah sumber daya manusia yang terlibat.
6.	Warga Kalurahan Bugel	3 (tiga)	Partisipan kegiatan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Keaktifan partisipan dalam kegiatan pengelolaan sampah. - Kegiatan pengelolaan

				sampah yang pernah diikuti dari Kalurahan Bugel.
--	--	--	--	--

Sumber: Olahan Penulis

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik yang akan menghasilkan informasi melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam mendapatkan informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi yang dicari dalam pengumpulan data bisa berasal dari buku dan teori yang mengemukakan pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tabel 1. 7 Daftar Dokumentasi

No.	Informan	Data Dokumentasi yang diambil
1.	Kalurahan Bugel	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi setiap kegiatan pengelolaan sampah - SK Bank Sampah di Kalurahan Bugel
2.	Dinas PMD Dalduk dan KB	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel - Dokumentasi dialog pertama dalam pelaksanaan kolaborasi - Materi pengelolaan sampah yang diberikan
3.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kegiatan

		pengelolaan sampah di Kalurahan Bugel - Materi pengelolaan sampah yang diberikan
4.	Bank Sampah Kusuma Tanaya	- Dokumentasi kegiatan pengelolaan sampah.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik data yang sudah dilakukan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana saja yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga isi dari penelitian yang didapat mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif mempunyai empat tahap diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

1) Pengolahan data

Langkah pertama dalam tahap pengolahan data adalah memeriksa integritas data. Langkah ini dilakukan setelah data terkumpul. Penulis perlu membuat inventarisasi untuk memastikan semua data telah dikumpulkan dengan benar. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas data, yang dilakukan dengan mengamati apakah jawaban informan sudah terisi semua kolom sesuai harapan penulis, atau semua pertanyaan dijawab dengan memuaskan.

Melakukan pemeriksaan kualitas data dengan menentukan apakah data tidak memadai dan apakah diperlukan pengambilan data lebih lanjut.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang memperhatikan abstraksi dan transformasi data mentah dari rekaman yang direkam di lapangan untuk menyederhanakan hasil. Proses ini akan terus berlangsung selama masa studi. Sebelum data ini benar-benar dikumpulkan dalam kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan sekumpulan informasi untuk memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Format penyajian data penelitian kualitatif ini adalah format teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Formulir ini menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang koheren dan dapat diakses, sehingga memudahkan untuk memeriksa kemajuan, apakah kesimpulan yang dicapai sudah benar atau apakah perlu dianalisis ulang.

4) Penarikan Kesimpulan

Upaya menarik kesimpulan terus dilakukan di lapangan. Dari awal pengumpulan data, penulis harus mulai mencari makna pada sesuatu, mencatat pola yang teratur (misalnya catatan teori), penjelasan, kemungkinan konstruksi, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang dicapai juga harus diverifikasi selama penelitian, yaitu selama penelitian, melalui pemikiran ulang, meninjau catatan lapangan, pemeriksaan ulang, dan upaya ekstensif untuk menempatkan salinan hasil di kumpulan data lainnya.